

ANALISI KUALITATIF TRANSPARANSI ANGGARAN PUBLIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP OPINI WAJAR TANPA PENGECEUALIAN PEMERINTAH DAERAH

Yacobin Bulu¹, Urbaningsi Susu², Finsensa Kawe³, Yohana Sel⁴, Susana Baso⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

E-mail : anchiyeta@gmail.com¹, ningsisusu03@gmail.com², Wyndykawe@gmail.com³,
vianisel2005@gmail.com⁴, Purnamabaso@gmail.com⁵

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menelaah peran transparansi anggaran publik dalam mendukung perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan pemerintah daerah. Keterbukaan anggaran diposisikan sebagai komponen penting dalam menciptakan tata kelola yang akuntabel, efisien, serta terhindar dari praktik penyimpangan. Dalam praktik pengelolaan keuangan daerah, penyediaan informasi anggaran secara terbuka tidak hanya memungkinkan masyarakat mengakses proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran, tetapi juga membantu meningkatkan ketepatan pencatatan dan mutu penyajian laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi kasus pada pemerintah daerah yang telah menerima opini WTP. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi atas keterbukaan informasi, serta telaah dokumen APBD dan laporan keuangan, kemudian diverifikasi melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi anggaran memiliki pengaruh yang jelas terhadap penguatan akuntabilitas, peningkatan efektivitas pengendalian internal, dan keterjagaan konsistensi data antarorganisasi perangkat daerah. Daerah yang menerapkan keterbukaan informasi secara berkelanjutan cenderung memiliki sistem pelaporan keuangan yang lebih teratur, kesalahan material yang lebih rendah, serta memperoleh tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari auditor dalam menilai kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu, transparansi turut memperluas ruang pengawasan publik dan partisipasi masyarakat, yang berperan dalam menekan kemungkinan terjadinya penyimpangan anggaran. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan transparansi anggaran merupakan langkah penting bagi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas laporan keuangan dan memastikan keberhasilan perolehan opini WTP secara konsisten.

Kata Kunci : Transparansi Anggaran, Akuntabilitas Publik, Opini WTP, Pengelolaan Keuangan Daerah.

ABSTRACT

This study was conducted to examine the role of public budget transparency in supporting the achievement of an Unqualified Opinion (WTP) in local government financial reports. Budget transparency is positioned as an important component in creating accountable, efficient governance that is free from malpractice. In the practice of local financial management, the provision of open budget information not only allows the public to access the process of planning, implementation, and reporting of the budget, but also helps improve the accuracy of recording and the quality of financial report presentation. This study uses a descriptive qualitative method through a case study of local governments that have received an unqualified opinion. Data was collected through in-depth interviews, observations on information disclosure, and reviews of regional budget documents and financial reports, then verified through triangulation of sources and methods. The results show that budget transparency has a clear influence on strengthening accountability, increasing the effectiveness of internal control, and maintaining data consistency between regional organizations. Regions that implement information disclosure on an ongoing basis tend to have more organized financial reporting systems, lower material errors, and higher

levels of trust from auditors in assessing compliance with Government Accounting Standards. In addition, transparency.

Keywords: *Budget Transparency, Public Accountability, WTP Opinion, Regional Financial Management.*

PENDAHULUAN

Anggaran publik merupakan rencana keuangan yang dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah guna mengatur pemasukan dan pengeluaran selama periode tertentu, umumnya satu tahun anggaran. Sumber dari anggaran ini berasal dari dana publik seperti pajak, biaya layanan, transfer dana, dana penerimaan dari negara atau daerah lainnya serta dimanfaatkan untuk mendanai layanan publik dan proses pembangunan. Dengan kata lain, anggaran publik menunjukkan dari mana uang pemerintah berasal, untuk apa digunakan dan bagaimana proses penggunaan harus dipertanggungjawabkan.

Dalam era pemerintahan yang modern, pentingnya transparansi dalam anggaran publik menjadi pokok bahasan yang signifikan untuk mencapai akuntabilitas dan efisiensi dalam pemanfaatan dana publik. Transparansi anggaran bukan sekadar mengenai keterbukaan informasi finansial pemerintah, melainkan juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan anggaran, serta menyediakan informasi yang mudah diakses dan dimengerti oleh publik. Dalam penerapannya, rendahnya tingkat transparansi anggaran sering kali menjadi salah satu faktor yang menyebabkan inefisiensi dalam pengeluaran di daerah. Hal itu karena terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi anggaran menciptakan peluang untuk terjadinya pemborosan, pengalokasian anggaran yang tidak tepat, hingga praktik korupsi yang merugikan keuangan negara secara sistematis. (Mustika et al., 2025).

Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan cara yang teratur, mematuhi semua peraturan yang ada, serta efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sambil memperhatikan prinsip keadilan, kepatutan, dan kepentingan masyarakat. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah mencakup keabsahan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan keuangan yang baik, perlindungan terhadap aset fisik dan finansial, serta pencegahan terhadap pemborosan dan pengelolaan yang salah. Dari sudut pandang tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berfungsi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, dengan misi utama meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan demi kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. (Putra, n.d.).

Dalam konteks penilaian laporan keuangan daerah, kualitas keterbukaan anggaran sering kali dihubungkan dengan pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP tidak hanya merefleksikan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, tetapi juga menunjukkan seberapa efektif sistem pengendalian internal serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, tingkat transparansi anggaran diyakini berhubungan erat dengan meningkatnya kepercayaan auditor terhadap keakuratan informasi keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah.

Namun demikian, pencapaian opini WTP masih menjadi tantangan untuk beberapa daerah karena berbagai faktor, seperti sistem pelaporan yang lemah, terbatasnya akses terhadap informasi publik, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Hal ini mengangkat pertanyaan penting mengenai seberapa besar kontribusi transparansi anggaran terhadap perbaikan kualitas laporan keuangan di tingkat daerah.

KAJIAN TEORI

Transparansi Anggaran Publik

Transparansi anggaran publik didefinisikan sebagai keterbukaan informasi terkait dengan seluruh proses pengelolaan anggaran publik mulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Transparansi ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui, memantau, dan mengevaluasi penggunaan anggaran oleh pemerintah, sehingga memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan kepentingan masyarakat menyatakan bahwa transparansi anggaran publik merupakan mekanisme penting yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi keuangan negara secara lebih terbuka, sehingga meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. (Imam & Basyarahil, 2024).

Selain itu, keterbukaan anggaran publik dianggap sebagai salah satu syarat untuk membangun pemerintahan yang baik, karena transparansi informasi anggaran mendorong pemerintah untuk bertindak lebih bertanggung jawab dalam setiap fase pengelolaan keuangan. Keterbukaan ini tidak hanya mencakup penyampaian data anggaran, tetapi juga menjamin bahwa informasi disajikan dengan cara yang tepat, mudah dipahami, relevan, dan sesuai waktu, sehingga dapat digunakan oleh masyarakat, DPRD, dan lembaga pengawas dalam proses pengambilan keputusan serta penilaian kinerja. Dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, transparansi anggaran juga sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan prinsip akuntabilitas yang ditetapkan dalam pengelolaan APBD, sehingga semakin memperkuat peran masyarakat dalam mencegah penyimpangan, meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah, dan memastikan bahwa belanja pemerintah benar-benar berfokus pada kepentingan dan pelayanan kepada masyarakat.

Di samping usaha untuk membuka akses informasi, transparansi pada anggaran publik juga memiliki peranan dalam mengurangi ketidakpuasan informasi antara pemerintah yang mengelola anggaran dan masyarakat yang berkepentingan. Apabila informasi mengenai anggaran bersifat tertutup atau sulit dijangkau, risiko terjadinya penyimpangan, pengolahan data yang tidak benar, dan keputusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan publik akan semakin meningkat. Dengan adanya transparansi, masyarakat berpeluang untuk melakukan pengawasan terhadap proses penganggaran, sehingga mendorong pemerintah agar lebih hati-hati dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran. Hal ini sejalan dengan pandangan dari teori keagenan, yang menegaskan bahwa pembukaan informasi adalah mekanisme penting untuk mengurangi risiko moral hazard dan meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah.

Tidak hanya menitikberatkan pada penyediaan data, penerapan anggaran publik yang transparan juga membuka kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan daerah. Masyarakat tidak hanya sekadar menerima informasi, tetapi juga dapat secara aktif ambil bagian melalui forum perencanaan seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), konsultasi publik, dan pengajuan aspirasi yang didasarkan pada data anggaran yang tersedia untuk umum. Keterlibatan ini

memberikan masukan kepada pemerintah yang lebih objektif terkait prioritas belanja daerah, serta meningkatkan legitimasi dari kebijakan publik. Dengan demikian, transparansi anggaran tidak hanya menjadi tanggung jawab administratif, tetapi juga berfungsi sebagai alat strategis untuk memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan mutu pelayanan, serta memastikan pengelolaan keuangan daerah dijalankan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Opini wajar tanpa pengecualian adalah pernyataan yang menjelaskan bahwa laporan keuangan suatu entitas yang diaudit telah disajikan secara akurat dalam setiap aspek yang signifikan dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Menurut Mahmudi (2006), “opini terbaik adalah wajar tanpa pengecualia”. Opini ini diberikan oleh auditor karena mereka yakin bahwa laporan keuangan tidak memiliki kesalahan atau kekeliruan yang berarti. Keyakinan ini didasarkan pada bukti-bukti yang diperoleh selama proses audit. (Nurabiah, 2018).

Menurut Mahmudi (2006), opini wajar tanpa pengecualian adalah opini yang paling baik karena mencerminkan tingkat kualitas pelaporan keuangan yang optimal. Auditor memberikan opini ini berdasarkan keyakinan profesional setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Bukti tersebut dikumpulkan melalui berbagai prosedur, seperti pemeriksaan dokumen, pengujian transaksi, konfirmasi saldo, serta evaluasi terhadap sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh entitas yang diaudit.

Pemberian opini WTP tidak hanya berarti laporan keuangan bebas dari salah saji material, tetapi juga menunjukkan bahwa entitas telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pemeriksaan pemerintah daerah, auditor mengacu pada empat kriteria utama menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), yaitu kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan informasi, efektivitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap regulasi. Ketuntasan dalam memenuhi keempat aspek tersebut menjadi dasar penting bagi auditor untuk menyimpulkan kewajaran laporan keuangan.

Meskipun demikian, perolehan opini WTP tidak berarti bahwa pengelolaan keuangan sudah sempurna tanpa kelemahan. Opini ini lebih menggambarkan bahwa tidak ada kesalahan material yang memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan, sehingga masih dimungkinkan adanya rekomendasi perbaikan dari auditor. Oleh karena itu, pencapaian WTP seharusnya dipahami sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah, bukan hanya sebagai target administratif semata.

Hubungan Transparansi Anggaran dengan Opini WTP

Transparansi anggaran tidak sekadar diartikan sebagai keterbukaan informasi, tetapi juga sebagai langkah dari pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dapat ditelusuri secara jelas. Jika setiap fase anggaran dari perencanaan hingga pelaporan tercatat dan bisa diakses, maka kualitas data yang dipakai untuk membuat laporan keuangan akan lebih terjamin. Hal ini membantu pemerintah daerah dalam mengurangi kesalahan pencatatan yang bisa mengganggu akurasi laporan keuangan.

Kaitan antara transparansi dan opini WTP dapat diamati dari segi peningkatan akuntabilitas kinerja. Semakin terbuka pemerintah dalam menyediakan informasi tentang anggaran, semakin besar motivasi bagi setiap perangkat daerah untuk melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan sasaran yang telah ditentukan. Akuntabilitas yang kuat

menunjukkan proses pengelolaan keuangan yang lebih disiplin dan terukur, sehingga meningkatkan kepercayaan auditor terhadap keandalan laporan keuangan yang diaudit.

Di samping itu, transparansi anggaran memperkuat kerja sama antarunit dalam pemerintah daerah. Keterbukaan data mendorong sinkronisasi antar OPD dalam pengumpulan bukti pendukung, verifikasi transaksi, serta pelaporan keuangan. Akurasi dan konsistensi data antarunit merupakan salah satu aspek penting dalam evaluasi auditor, karena ketidakcocokan informasi dapat mengakibatkan temuan yang dapat menurunkan kualitas opini. Dengan demikian, transparansi secara tidak langsung memperkuat integrasi sistem pelaporan keuangan.

Dari perspektif pengawasan, transparansi memberikan kesempatan bagi pihak luar seperti DPRD, masyarakat, dan media untuk melakukan kontrol sosial terhadap pengeluaran anggaran. Ketika pengawasan publik berjalan dengan baik, potensi terjadinya penyimpangan, pemborosan, atau kegiatan tidak nyata dapat diminimalkan. Risiko kesalahan material dalam laporan keuangan juga berkurang, sehingga kesempatan pemerintah daerah untuk mendapatkan opini WTP menjadi lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya mempengaruhi laporan, tetapi juga perilaku dalam pengelolaan anggaran.

Secara keseluruhan, transparansi anggaran berfungsi sebagai mekanisme yang menciptakan lingkungan pengelolaan keuangan yang lebih teratur, jujur, dan sesuai dengan peraturan. Pemerintah daerah yang secara konsisten menerapkan keterbukaan informasi biasanya memiliki proses administrasi keuangan yang lebih baik, dokumen pendukung yang lengkap, serta tingkat kesalahan yang lebih rendah. Karena itu, peningkatan transparansi bukan hanya memenuhi kebutuhan publik, tetapi juga menjadi strategi penting untuk meraih dan mempertahankan opini WTP dari BPK secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada studi kasus pemerintah daerah yang meraih opini WTP. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi mengenai keterbukaan informasi anggaran, dan analisis dokumen-dokumen seperti APBD serta laporan keuangan. Proses analisis mencakup reduksi data, penyajian hasil temuan, dan penarikan kesimpulan untuk mengkaji hubungan antara transparansi anggaran dengan opini WTP. Keberadaan data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode, serta melakukan konfirmasi hasil kepada informan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa keterbukaan anggaran publik sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta peluang untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Melalui analisis kualitatif terhadap berbagai literatur, peraturan, dan praktik pengelolaan keuangan daerah, ditemukan bahwa transparansi informasi anggaran tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi alat penting dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan berfokus pada kepentingan masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa daerah yang secara rutin menerapkan transparansi anggaran, contohnya dengan membagikan dokumen APBD secara terbuka, melibatkan masyarakat dalam forum perencanaan pembangunan (musrenbang), serta memberikan akses data keuangan melalui platform online, memiliki laporan keuangan yang lebih baik. Keterbukaan ini berkontribusi pada peningkatan akurasi pencatatan, konsistensi data antarorganisasi perangkat daerah (OPD), serta memperkuat kepercayaan auditor terhadap keandalan laporan keuangan. Sebaliknya, daerah dengan tingkat transparansi yang rendah seringkali menghadapi berbagai masalah, seperti pemborosan dana, alokasi dana yang tidak sesuai, lemahnya pengawasan dari masyarakat, hingga praktik korupsi yang merugikan keuangan negara.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menunjukkan bahwa keterbukaan informasi anggaran memiliki hubungan yang kuat dengan efektivitas sistem pengendalian internal. Daerah yang menerapkan transparansi dengan baik lebih mampu menunjukkan bukti pendukung yang lengkap, verifikasi transaksi yang tepat, dan pelaporan keuangan yang konsisten. Ini memudahkan auditor dalam menilai kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Dengan demikian, transparansi anggaran terbukti meningkatkan peluang pemerintah daerah untuk secara berkelanjutan mendapatkan opini WTP.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa keterbukaan anggaran publik menjadi salah satu elemen penting bagi pencapaian opini WTP. Keterbukaan tidak hanya berfungsi sebagai cara untuk menyampaikan informasi, tetapi juga berperan sebagai alat akuntabilitas yang mendorong pemerintah daerah untuk lebih tertib dalam mengelola keuangan. Akses informasi ini memungkinkan masyarakat, DPRD, dan media untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran, yang dapat menurunkan potensi terjadinya penyimpangan, kesalahan data, serta praktik korupsi. Hal ini sejalan dengan teori keagenan, yang berpendapat bahwa transparansi informasi dapat mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal, sehingga mengurangi risiko perilaku yang merugikan.

Di samping itu, transparansi memberi dampak langsung terhadap efektivitas sistem pengendalian internal. Dengan tersedia data yang terbuka, kolaborasi antar unit kerja di dalam pemerintah daerah menjadi lebih baik. Koordinasi antara OPD dalam pengumpulan bukti pendukung, verifikasi transaksi, dan pelaporan keuangan menjadi lebih solid, sehingga auditor dapat lebih mudah mengevaluasi sistem pengendalian internal. Konsistensi dan ketepatan data di antara unit adalah faktor penting dalam penilaian auditor, karena ketidakcocokan informasi dapat menurunkan kualitas opini. Oleh karena itu, transparansi berfungsi sebagai penguat sistem pelaporan keuangan daerah.

Selanjutnya, transparansi anggaran juga menciptakan kesempatan untuk partisipasi publik yang lebih besar. Melalui forum perencanaan seperti musrenbang, konsultasi publik, dan pengajuan aspirasi berdasarkan data anggaran, masyarakat dapat secara aktif berperan dalam menetapkan prioritas belanja daerah. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan publik, tetapi juga memastikan agar alokasi anggaran lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, transparansi berperan ganda: sebagai alat pengawasan dan sebagai cara untuk memperkuat demokrasi partisipatif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa pencapaian opini WTP tidak hanya bisa dianggap sebagai target administrasi, melainkan sebagai hasil dari proses pengelolaan keuangan yang sehat, terbuka, dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah

yang secara konsisten menerapkan transparansi anggaran memiliki kesempatan yang lebih tinggi untuk memperoleh opini WTP secara berkelanjutan, karena keterbukaan ini memperkuat akuntabilitas informasi, meningkatkan kualitas laporan keuangan, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dengan kata lain, transparansi anggaran publik adalah landasan dari strategi untuk mencapai pemerintahan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya keuangan yang efisien dan efektif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa keterbukaan terhadap anggaran publik sangat penting untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Transparansi informasi anggaran tidak hanya bertujuan memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga berfungsi sebagai alat utama untuk menciptakan akuntabilitas, meningkatkan pengawasan dari masyarakat, serta memastikan pengelolaan sumber daya keuangan dilakukan dengan efisien, efektif, dan bertanggung jawab.

Daerah yang secara konsisten menerapkan transparansi anggaran melalui penyediaan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), partisipasi publik, dan akses data berbasis teknologi terbukti memiliki laporan keuangan yang lebih akurat, konsisten, dan dapat dipercaya. Keterbukaan ini juga memperkuat efektivitas sistem pengendalian internal, meningkatkan kerja sama antar unit kerja daerah, serta mengurangi risiko terjadinya kesalahan material atau praktik penyimpangan.

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa transparansi anggaran berhubungan positif dan signifikan dengan kesempatan pemerintah daerah untuk memperoleh opini WTP. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa keterbukaan informasi dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, memperkuat akuntabilitas publik, dan meningkatkan kepercayaan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, peningkatan transparansi anggaran harus terus menjadi komitmen dari pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Imam, A., & Basyarahil, A. (2024). No Title. 05(02), 199–221.

Mustika, M., Afdillah, W., Sartika, R., & Pangestoeti, W. (2025). Transparansi Anggaran Publik Dan Implikasinya Terhadap Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Daerah. 02(04), 1245–1250.

Nurabiah. (2018). ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG MEMPEROLEH OPINI WAJAR. 3(1), 67–100.

Putra, G. (n.d.). Faculty of Economics Riau University,. 163–177.